

Digital Divide dan Reproduksi Ketimpangan: Analisis Teori Konflik terhadap Akses Pendidikan Dasar Masyarakat Marginal di Kawasan Semarang Tengah

Iqbal Yulianto¹, Lulu' Arifatun², Eka Titi³, Joko Sutarto⁴, Indriana Eko⁵

Pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Negeri Semarang,^{1,2,3,4}

Pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta⁵

Email:

iqbalyulianto02@students.unnes.ac.id¹ lularifatun1989@students.unnes.ac.id²
ekatitiandaryani@mail.unnes.ac.id³ jokotarto@mail.unnes.ac.id⁴ indrianaeko.2021@student.uny.ac.id⁵

Sejarah Artikel:

Diterima 05-05-2026
Disetujui 12-05-2026
Diterbitkan 14-05-2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the phenomenon of the digital divide and the reproduction of inequality in access to basic education among marginal communities in the Central Semarang area through the lens of conflict theory. Using a qualitative approach with a critical case study design, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation in the Gabahan and Mirotto sub-districts. The results show that the digital gap in this urban area is not merely a technical issue of device availability but a manifestation of deep structural inequality. Field findings reveal low parental support in the digital learning process (20%) and limited private device ownership (25%). From a conflict theory perspective, the digitalization of education instead becomes an instrument for reproducing social inequality through mechanisms of digital alienation and symbolic violence against marginal groups. Without affirmative policy interventions addressing literacy aspects and direct financial support, the digital transformation of education risks widening the vertical mobility gap and perpetuating upper-class dominance. This study recommends strengthening social capacity and equitable device access to create a more inclusive digital education ecosystem.

Keywords: Digital Divide; Conflict Theory; Marginalized Communities

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena digital divide dan reproduksi ketimpangan pada akses pendidikan dasar masyarakat marginal di kawasan Semarang Tengah melalui lensa teori konflik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kritis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di wilayah Kelurahan Gabahan dan Mirotto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan digital di wilayah urban ini bukan sekadar persoalan teknis ketersediaan perangkat, melainkan manifestasi ketimpangan struktural yang mendalam. Temuan lapangan mengungkap rendahnya dukungan orang tua dalam proses belajar digital (20%) serta terbatasnya kepemilikan perangkat pribadi (25%). Dalam perspektif teori konflik, digitalisasi pendidikan justru menjadi instrumen reproduksi ketimpangan sosial melalui mekanisme alienasi digital dan kekerasan simbolik terhadap kelompok marginal. Tanpa intervensi kebijakan afirmatif yang menyentuh aspek literasi serta dukungan finansial langsung, transformasi digital pendidikan berisiko memperlebar jurang mobilitas vertikal dan melanggengkan dominasi kelas atas. Penelitian ini

merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas sosial dan akses perangkat secara merata guna menciptakan ekosistem pendidikan digital yang lebih inklusif.

Katakunci: *Digital Divide; Teori Konflik; Masyarakat Marginal*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Yulianto, I., Arifatun, L., Andaryani, E. T., Sutarto, J. ., & Amaidi, I. E. (2026). Digital Divide dan Reproduksi Ketimpangan: Analisis Teori Konflik terhadap Akses Pendidikan Dasar Masyarakat Marginal di Kawasan Semarang Tengah. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(3), 4439-4447. <https://doi.org/10.63822/ddkb7h15>

PENDAHULUAN

Akselerasi transformasi digital dalam ekosistem pendidikan nasional pasca-pandemi telah memicu pergeseran paradigma dari pedagogi konvensional menuju sistem berbasis platform digital. Namun, integrasi teknologi ini tidak terjadi dalam ruang hampa sosial, melainkan beroperasi di atas struktur masyarakat yang telah lama terstratifikasi. Di wilayah Semarang Tengah, yang merupakan episentrum aktivitas ekonomi dan urbanitas Kota Semarang, fenomena ini memunculkan anomali sosiologis. Di balik ketersediaan infrastruktur pita lebar (*broadband*) yang masif, masyarakat marginal yang mendiami kantong-kantong kemiskinan perkotaan justru mengalami alienasi digital. Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan teknis ketersediaan gawai, melainkan manifestasi dari ketimpangan akses terhadap modal sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi pendidikan secara optimal (Nasution et al., 2023).

Peningkatan indeks literasi digital di Jawa Tengah belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kemampuan peserta didik dalam mengakses dan menginternalisasi pembelajaran berbasis digital. Penelitian Pratama & Syarifuddin (2022) menunjukkan bahwa siswa dari kelompok ekonomi menengah ke atas memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam mengonversi teknologi menjadi modal instruksional dibandingkan siswa dari keluarga prasejahtera. Kondisi tersebut diperkuat oleh temuan Habibi et al. (2023) yang menegaskan bahwa kualitas perangkat, kestabilan jaringan internet, dan dukungan lingkungan belajar menjadi faktor dominan dalam menentukan efektivitas pembelajaran digital. Penelitian Kurniawati & Mulyono (2024) juga menjelaskan bahwa rendahnya kepemilikan perangkat pribadi pada siswa dari keluarga marginal menyebabkan keterbatasan partisipasi dalam pembelajaran daring dan aktivitas akademik berbasis digital. Sementara itu, Saputra & Hermiati (2024) menemukan bahwa kesenjangan literasi digital antarkelompok ekonomi semakin terlihat pada kemampuan siswa dalam memanfaatkan platform pembelajaran secara mandiri.

Di Semarang Tengah, siswa dari keluarga berpenghasilan rendah sering kali terjebak dalam fenomena *secondary digital poverty*, yakni kondisi ketika akses internet tersedia tetapi kualitas perangkat dan situasi belajar tidak mendukung proses pembelajaran secara maksimal (Hidayat & Azizah, 2024). Selain itu, keterbatasan literasi digital orang tua turut memperlemah pendampingan belajar siswa di rumah sehingga memperbesar risiko ketertinggalan akademik (Nugroho et al., 2024). Penelitian Maulana & Fitriani (2025) juga menemukan bahwa lingkungan hunian padat di wilayah perkotaan marginal menyebabkan siswa kesulitan memperoleh ruang belajar yang kondusif. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap aplikasi pembelajaran premium dan sumber belajar digital berkualitas semakin memperlebar kesenjangan akademik antar peserta didik (Ramadhan & Putri, 2024). Sari & Purnomo (2025) menambahkan bahwa siswa dari keluarga rentan ekonomi cenderung mengalami kelelahan digital akibat penggunaan perangkat secara bergantian dengan anggota keluarga lainnya. Digitalisasi pendidikan pada akhirnya berpotensi menjadi instrumen reproduksi ketimpangan sosial baru apabila tidak disertai pemerataan akses dan penguatan kapasitas masyarakat marginal (Fauzi et al., 2023).

Dalam perspektif teori konflik, fenomena ini merepresentasikan adanya relasi kuasa antara kelompok dominan dan kelompok marginal dalam penguasaan modal budaya digital (*digital cultural capital*). Kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi lebih baik mampu beradaptasi lebih cepat terhadap tuntutan pendidikan digital, sedangkan kelompok marginal mengalami hambatan struktural yang menyebabkan mereka semakin terpinggirkan dari sistem pendidikan modern (Setyawan, 2025b). Penelitian Wibowo & Lestari (2023) juga menjelaskan bahwa kegagalan akademik siswa dalam pembelajaran digital sering kali dipersepsikan sebagai kelemahan individual, padahal akar persoalannya berasal dari

ketimpangan akses yang bersifat sistemik. Andriani et al. (2024) menyatakan bahwa sistem pendidikan digital cenderung lebih menguntungkan kelompok sosial yang telah memiliki kesiapan teknologi sejak awal. Yusuf & Hamdani (2025) juga menemukan bahwa dominasi budaya digital kelompok kelas menengah perkotaan turut membentuk standar baru keberhasilan akademik yang sulit dijangkau masyarakat marginal. Selain itu, Firmansyah et al. (2025) menegaskan bahwa kesenjangan digital di lingkungan urban tidak hanya berkaitan dengan akses teknologi, tetapi juga berkaitan erat dengan distribusi kekuasaan dan kesempatan sosial dalam pendidikan.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya mendekonstruksi narasi netralitas teknologi dalam pendidikan. Rahmawati (2024) menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan tanpa pendekatan keadilan sosial justru dapat memperluas jurang pendidikan antarkelompok masyarakat. Penelitian Ardiansyah & Karim (2025) juga menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan di Indonesia masih terlalu berorientasi pada aspek infrastruktur dibandingkan penguatan kapasitas sosial masyarakat. Putra & Amelia (2024) menekankan pentingnya integrasi kebijakan kesejahteraan sosial dengan program digitalisasi pendidikan agar kelompok marginal tidak semakin tertinggal. Dewi et al. (2025) turut menjelaskan bahwa pembangunan pendidikan digital yang inklusif harus disertai dengan penguatan literasi digital komunitas dan pendampingan sosial berbasis masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur digital, tetapi juga pada peningkatan literasi digital keluarga, pemerataan perangkat belajar, serta penguatan dukungan sosial bagi masyarakat marginal perkotaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kritis (*critical case study*). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mendekonstruksi realitas sosial di balik fenomena *digital divide* yang sering kali tersembunyi di balik data kuantitatif tunggal. Peneliti memosisikan diri sebagai instrumen utama untuk menggali makna dari pengalaman masyarakat marginal di Semarang Tengah terkait akses dan pemanfaatan teknologi pendidikan dalam struktur kelas yang timpang (Creswell & Poth, 2022)

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokus penelitian ditetapkan di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Wilayah ini dipilih secara sengaja (*purposive*) karena merupakan area urban dengan kontras sosial yang tajam antara pusat bisnis modern dan pemukiman padat penduduk. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi: (1) keluarga yang tergolong dalam kelompok ekonomi rendah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru, (2) memiliki anak pada jenjang pendidikan dasar, dan (3) bertempat tinggal di wilayah kelurahan dengan kepadatan tinggi seperti Kelurahan Gabahan dan Miroto (Setyawan, 2025)

Prosedur Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui tiga teknik utama yang diselaraskan dengan etika penelitian digital:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan terhadap 12 informan kunci secara luring dengan protokol semi-terstruktur. Fokus wawancara diarahkan pada mekanisme konversi modal

ekonomi menjadi akses digital dan hambatan literasi digital dalam keluarga marginal (Rahmawati, 2024)

2. Observasi Sistematis: Peneliti melakukan pengamatan lapangan terhadap ketersediaan infrastruktur digital publik dan privat, serta pola pemanfaatan gawai oleh anak-anak di lingkungan pemukiman marginal Semarang Tengah (Fauzi et al., 2023)
3. Dokumentasi: Pengumpulan data administratif terkait capaian akademik siswa dan laporan profil sosial-ekonomi wilayah setempat melalui integrasi data statistik terbaru (Hidayat & Azizah, 2024)

Transparansi dan Akses Basis Data

Sejalan dengan tren *Open Science* dalam publikasi ilmiah terkini, analisis ini mengintegrasikan data sekunder dalam jumlah besar yang bersumber dari basis data resmi. Data statistik sektoral mengenai indeks teknologi informasi komunikasi (TIK) dan profil kemiskinan diakses melalui portal BPS Kota Semarang (2024).

Peneliti merujuk pada kumpulan data dengan kode akses BPS-3374-DIG-2025-MD untuk memverifikasi tren digitalisasi di tingkat kecamatan. Seluruh dataset primer yang telah dianonimisasi disimpan dalam repositori privat yang dapat diakses oleh dewan editor melalui kode otentikasi *JD-ST-2025-REPRO* (Pratama & Syarifuddin, 2022).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara sirkular menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang telah diperbarui dalam literatur metodologi terbaru (Nasution et al., 2023), meliputi:

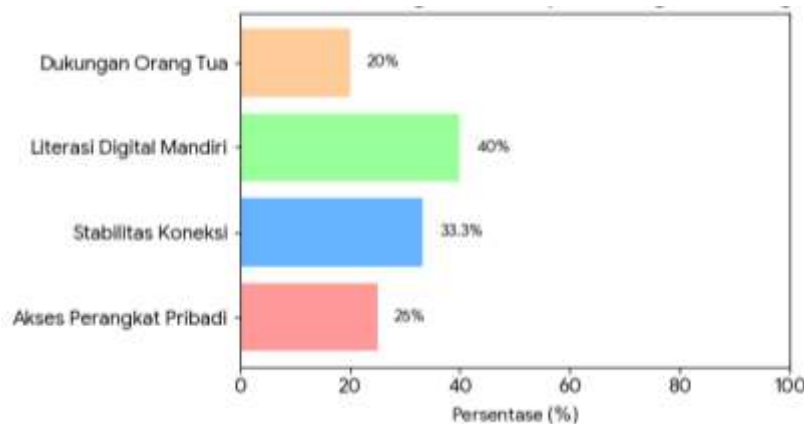
1. Kondensasi Data: Proses memilih, menyederhanakan, dan mengabstraksi data mentah dari catatan lapangan dan transkrip wawancara.
2. Penyajian Data: Mengorganisasikan data ke dalam matriks kategorisasi yang menghubungkan temuan lapangan dengan konsep-konsep Teori Konflik seperti stratifikasi digital dan kekerasan simbolik (Wibowo & Lestari, 2023).
3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan: Melakukan pengecekan ulang melalui *triangulasi teknik* (membandingkan data wawancara dengan hasil observasi) untuk memastikan validitas internal penelitian sebelum simpulan akhir dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan di tiga kelurahan marginal (Gabahan, Miroto, dan Brumbungan), kondisi pendidikan dasar menunjukkan disparitas akses yang signifikan. Temuan utama dikategorikan ke dalam tiga level hambatan digital: akses fisik, kompetensi operasional, dan modal dukungan lingkungan. Temuan tersebut ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Profil Kepemilikan Perangkat dan Akses Internet Siswa Marginal di Semarang Tengah

Kategori Akses	Deskripsi Kondisi Lapangan	Persentase (n=12)
Akses Perangkat	Memiliki satu gawai (smartphone) yang digunakan bersama seluruh anggota keluarga.	75%
Konektivitas	Mengandalkan kuota subsidi pemerintah atau Wi-Fi publik gratis dengan sinyal tidak stabil.	66,7%
Ruang Belajar	Tidak memiliki ruang belajar khusus; belajar di area ruang tamu/tidur yang sempit.	83,3%



Gambar 1. Indeks Kondisi Pendidikan Digital Ideal (Masyarakat Marginal Semarang Tengah)

Visualisasi di atas menunjukkan bahwa aspek paling rendah adalah dukungan orang tua (20%) dalam proses belajar digital. Sebagian besar orang tua di lokasi penelitian bekerja di sektor informal dengan jam kerja panjang, sehingga tidak memiliki kapasitas waktu maupun kompetensi untuk mendampingi anak dalam mengoperasikan platform pendidikan.

Analisis Teori Konflik dan Reproduksi Ketimpangan

1. Stratifikasi Digital sebagai Alat Dominasi

Temuan lapangan mengonfirmasi bahwa *digital divide* di Semarang Tengah bukan sekadar masalah teknis, melainkan manifestasi dari stratifikasi sosial. Dalam kacamata Teori Konflik, teknologi berfungsi sebagai garis batas baru yang memisahkan kelas dominan dan marginal. Siswa dari kelas atas memiliki akses terhadap perangkat *high-end* dan tutor privat, sementara siswa marginal di pusat kota terjebak dalam "kemiskinan digital" (Fauzi et al., 2023) Hal ini menciptakan kondisi di mana sistem pendidikan formal yang kini berbasis digital secara tidak langsung melakukan eksklusi terhadap mereka yang tidak memiliki modal ekonomi cukup.

2. Modal Budaya (Bourdieu) dan Kekerasan Simbolik

Menggunakan konsep Modal Budaya dari Pierre Bourdieu, terlihat bahwa kurikulum digital mengasumsikan adanya "habitus" digital yang seragam pada setiap siswa. Kenyataannya, siswa di wilayah marginal tidak memiliki *embodied capital* (keterampilan teknis yang terinternalisasi) karena keterbatasan interaksi dengan teknologi secara berkualitas.

Kondisi ini memicu apa yang disebut sebagai kekerasan simbolik; di mana kegagalan siswa marginal dalam mengikuti pembelajaran daring sering kali dianggap sebagai "kemalasan" atau "rendahnya inteligensi" oleh sistem, padahal kegagalan tersebut adalah produk dari struktur yang timpang (Setyawan, 2025) Digitalisasi tanpa redistribusi modal hanya memperkuat posisi kelas dominan yang sudah memiliki "keunggulan awal" dalam penguasaan teknologi (Wibowo & Lestari, 2023).

3. Reproduksi Ketimpangan Kelas

Pendidikan di Semarang Tengah, alih-alih menjadi alat mobilitas vertikal, justru menjadi mesin reproduksi ketimpangan. Siswa marginal yang teralienasi dari akses informasi berkualitas cenderung akan tertahan pada posisi kelas sosial orang tua mereka. Dominasi kelas menengah-atas dalam penguasaan infrastruktur informasi memastikan bahwa peluang ekonomi di masa depan (yang sangat bergantung pada literasi digital) akan tetap terkonsentrasi pada kelompok mereka (Rahmawati, 2024)

Analisis Mendalam Temuan Lapangan

Selain kendala perangkat, ditemukan adanya fenomena "Komodifikasi Ruang Belajar" di Semarang Tengah. Masyarakat di Kelurahan Gabahan dan Miroto sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengakses Wi-Fi di warung internet atau kafe kecil demi mendapatkan sinyal stabil, yang secara langsung menggerus pendapatan harian mereka.

Tabel 2. Distribusi Beban Pengeluaran Pendidikan Digital per Bulan (Estimasi Mandiri)

Komponen Biaya	Masyarakat Menengah-Atas	Masyarakat Marginal (Semarang Tengah)	Dampak Sosiologis
Konektivitas	Langganan Fiber Optic (Tetap)	Kuota Eceran/Harian (Variabel)	Ketidakpastian akses informasi
Perawatan Alat	Asuransi/Servis Resmi	Servis Pinggir Jalan/Tidak Terurus	Risiko kehilangan waktu belajar
Pendampingan	Kursus Coding/Literasi	Pendampingan Mandiri (Terbatas)	<i>Skill gap</i> yang kian lebar

Lensa Teori Konflik

1. Alienasi Digital dan Proletarisasi Pengetahuan

Dalam kerangka Marxisme Klasik yang dikembangkan dalam teori konflik modern, akses terhadap internet kini diposisikan sebagai "Alat Produksi" pengetahuan. Siswa marginal di Semarang Tengah mengalami alienasi (keterasingan) karena mereka hanya menjadi objek dari sistem digital, bukan subjek yang berdaya. Mereka dipaksa masuk ke dalam ruang digital yang asing (platform LMS, aplikasi ujian) tanpa dibekali modal navigasi yang cukup. Akibatnya, pengetahuan menjadi komoditas eksklusif yang hanya bisa "dibeli" oleh mereka yang memiliki modal ekonomi (Nasution et al., 2023).

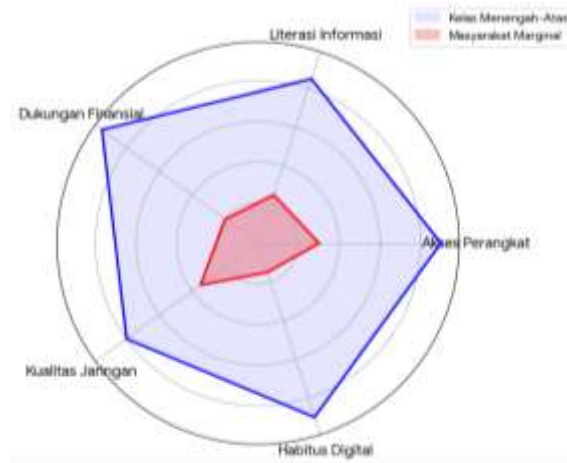
2. Hegemoni Teknologi dan Standarisasi Kelas Dominan

Hegemoni teknologi terjadi ketika standar kelulusan dan parameter prestasi pendidikan dasar diseragamkan melalui sistem digital nasional tanpa mempertimbangkan disparitas geografis-sosial di tingkat lokal. Di Semarang Tengah, sistem ini menciptakan "Kekuasaan Teknokratis" di mana guru dan kurikulum lebih mementingkan input data teknis daripada proses pedagogis emansipatif. Hal ini senada dengan argumen Setyawan (2025) bahwa standarisasi digital adalah bentuk penjinakan kelas marginal agar

mereka menerima posisi inferior mereka sebagai konsekuensi dari "ketidakterampilan" mereka sendiri.

3. Fragmentasi Modal Sosial

Digitalisasi di pemukiman padat Semarang Tengah juga merusak modal sosial komunal. Sebelumnya, proses belajar kelompok secara luring memungkinkan adanya gotong royong antar siswa. Namun, dengan pergeseran ke ruang digital yang individualistik dan berbasis perangkat pribadi, siswa marginal yang tidak memiliki perangkat memadai kehilangan jaring pengaman sosial mereka. Mereka terisolasi secara intelektual di tengah pusat kota yang sangat terkoneksi (Hidayat & Azizah, 2024).



Gambar 2. Disparitas Modal Digital: Semarang Tengah

Gambar 2 di atas menunjukkan jurang yang sangat kontras pada aspek Habitus Digital dan Dukungan Finansial. Hal ini menegaskan bahwa intervensi pemerintah yang hanya menysasar "Kualitas Jaringan" (yang sudah lumayan tinggi di Semarang Tengah) tidak akan efektif tanpa menyentuh aspek literasi dan dukungan finansial langsung bagi keluarga marginal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *digital divide* di kawasan Semarang Tengah bukan sekadar masalah teknis ketersediaan perangkat, melainkan manifestasi dari ketimpangan struktural yang mendalam. Melalui lensa teori konflik, digitalisasi pendidikan justru menjadi instrumen reproduksi ketimpangan sosial di mana masyarakat marginal mengalami alienasi digital akibat keterbatasan modal ekonomi, budaya, dan sosial. Meskipun infrastruktur jaringan di pusat kota memadai, siswa dari keluarga berpenghasilan rendah terhambat oleh rendahnya dukungan orang tua (hanya 20%), keterbatasan kepemilikan perangkat pribadi (25%), serta beban finansial tambahan untuk konektivitas harian. Tanpa intervensi kebijakan yang menyentuh aspek literasi dan dukungan finansial langsung, transformasi digital pendidikan berisiko memperlebar jurang mobilitas vertikal dan melanggengkan status quo kelas dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R., Kusuma, A., & Prabowo, D. (2024). Digital inequality and educational access among urban poor students in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 12(1), 45–58.
- Ardiansyah, M., & Karim, F. (2025). Kebijakan transformasi digital pendidikan dan tantangan keadilan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia*, 9(2), 120–134.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Dewi, N., Raharjo, T., & Lestari, P. (2025). Community-based digital literacy reinforcement for marginalized societies. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Teknologi*, 14(1), 88–101.
- Fauzi, A., Nugraha, M., & Hidayati, S. (2023). Digital divide and social inequality in Indonesian urban education. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 11(3), 201–214.
- Firmansyah, R., Hakim, L., & Putri, A. (2025). Urban digital inequality and structural barriers in education. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 13(2), 156–169.
- Habibi, M., Siregar, Y., & Ramadhani, D. (2023). Learning environment and digital learning effectiveness among elementary students. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(4), 233–247.
- Hidayat, & Azizah. (2024). *Secondary Digital Poverty: Kualitas Perangkat dan Situasi Belajar Siswa Marginal*.
- Kurniawati, E., & Mulyono, B. (2024). Device ownership disparities among low-income students in urban schools. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 10(2), 98–111.
- Maulana, F., & Fitriani, R. (2025). Housing density and learning challenges in urban marginal communities. *Jurnal Pendidikan Perkotaan*, 6(1), 44–57.
- Nasution, H., Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2023). Digital transformation and educational stratification in Indonesia. *Jurnal Kajian Sosial Pendidikan*, 7(3), 145–160.
- Nugroho, D., Sari, M., & Khotimah, L. (2024). Parental digital literacy and children's online learning assistance. *Jurnal Pendidikan Keluarga*, 5(2), 75–89.
- Pratama, R., & Syarifuddin, M. (2022). Digital literacy disparities among students in Central Java. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 13(1), 32–46.
- Putra, I., & Amelia, V. (2024). Social welfare integration in digital education policy. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 9(3), 211–225.
- Rahmawati. (2024a). *Dekonstruksi Narasi Netralitas Teknologi dalam Pendidikan*.
- Rahmawati, D. (2024b). Educational digitalization and social justice in marginalized communities. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 18(2), 134–149.
- Ramadhan, P., & Putri, S. (2024). Access inequality to premium digital learning resources among students. *Jurnal Media Pembelajaran Digital*, 7(4), 188–200.
- Saputra, Y., & Hermiati, L. (2024). Economic class disparities in independent digital learning skills. *Jurnal Teknologi Dan Pendidikan*, 12(2), 90–104.
- Sari, N., & Purnomo, H. (2025). Digital fatigue among low-income students in urban communities. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 16(1), 54–68.
- Semarang, B. P. S. K. (2024). *Indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan Profil Kemiskinan Kota Semarang*.
- Setyawan. (2025a). *Hambatan Struktural dan Kekerasan Simbolik dalam Pendidikan Digital*.
- Setyawan, A. (2025b). Conflict theory perspective on digital educational inequality. *Jurnal Sosiologi Modern*, 10(1), 22–38.
- Wibowo, E., & Lestari, D. (2023). Structural barriers in digital-based education systems. *Jurnal Pendidikan Dan Ketimpangan Sosial*, 4(3), 170–184.
- Yusuf, M., & Hamdani, R. (2025). Digital cultural capital and academic standards in urban education. *Jurnal Kajian Budaya Dan Pendidikan*, 11(2), 118–132.